



PROVINSI SUMATERA UTARA

Yth. 1. Sekretaris DPRD Provsu;
2. Inspektur Provsu
3. Kepala Perangkat Daerah Provsu;
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4/10/2024

TENTANG PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam upaya memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan Jabatan Fungsional, serta kebutuhan organisasi dan Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal untuk dipedomani:

1. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan melalui mekanisme
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian; dan
 - d. promosi.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan Kenaikan Jabatan Fungsional dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja, dilakukan dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia untuk kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki, berupa Rekomendasi dari Instansi Pembina dan Penetapan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan kenaikan jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Asesmen Kompetensi sesuai standar kompetensi yang disusun oleh Tim Asesor Badan Kepegawaian Provsu serta lulus Uji Kompetensi/memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.

4. Usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi ke Instansi Pembina Jabatan fungsional wajib melalui Badan Kepegawaian Provsu, apabila usulan tidak melalui Badan Kepegawaian Provsu maka Penetapan tidak akan ditindak lanjuti prosesnya.
5. Perhitungan Formasi dilakukan oleh Unit Kerja Pembina sesuai lampiran pada surat edaran ini.
6. Pejabat JPT Pratama yang akan mengusulkan Uji Kompetensi untuk Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama harus mendapatkan persetujuan PPK.
7. Perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan atau Perpindahan antar jabatan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan, dengan mempertimbangkan urgensi, mobilitas talenta dan capaian strategis perangkat Daerah serta RPJMD Provsu.
8. Perhitungan angka kredit pejabat fungsional tahun 2023 mempergunakan angka kredit konversi dari predikat kinerja SKP dan untuk penerapan mekanisme tersebut diminta kepada Pejabat Fungsional pada setiap perangkat daerah agar menyampaikan PAK Integrasi (bagi Pejabat Fungsional yang PAK sebelum tahun 2023 menggunakan PAK Konvensional) dan PAK konversi ke Badan Kepegawaian Provsu, paling lambat 31 Mei 2024 melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah.
9. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional.
10. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana huruf b sampai dengan huruf e pada point 6 dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dan dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.
11. Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional diusulkan unit kerja dan telah diterima Badan Kepegawaian Provsu 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) dan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) untuk setiap jenjang jabatan fungsional dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
12. Khusus pejabat fungsional ahli Madya yang akan diusulkan ke jenjang ahli utama tetapi akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan pertimbangan teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditetapkan oleh MenPAN RB Republik Indonesia.

13. Adapun apabila status Gubernur Sumatera Utara adalah Pelaksana Tugas/ Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah, berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 36185/B-AK.03/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 perihal penegasan bagi pelaksana tugas/ Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah tentang pengangkatan Pemindahan, Pemberhentian Promosi dan Mutasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah, disampaikan untuk dapat ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, maka tahapan sebelumnya wajib menyertakan Pertimbangan Teknis Kepala BKN, dimana usul pengantar Pertimbangan Teknis akan kami usulkan disetiap awal bulan berikutnya, dan ketentuan tersebut akan berakhir sampai dengan Kepala Daerah telah definitif.
14. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Provsu untuk hal-hal yang belum dipahami.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 4 April 2024

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

}{ttd}

ARIEF S. TRINUGROHO

Tembusan:

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 100.3.4/10/2024

Tanggal : 4 April 2024

| No | JABATAN FUNGSIONAL | INSTANSI PEMBINA | UNIT KERJA PEMBINA |
|----|---|---|---|
| 1 | Arsiparis | Arsip Nasional Republik Indonesia | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu |
| 2 | Pustakawan | Perpustakaan Nasional | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu |
| 3 | Perencana | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu |
| 4 | Analisis SDM Aparatur | Badan Kepegawaian Negara | Badan Kepegawaian Provsu |
| 5 | Asesor SDM Aparatur | Badan Kepegawaian Negara | Badan Kepegawaian Provsu |
| 6 | Pranata SDM Aparatur | Badan Kepegawaian Negara | Badan Kepegawaian Provsu |
| 7 | Analisis Kebencanaan | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu |
| 8 | Penata Penanggulangan Bencana | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu |
| 9 | Auditor | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | Inspektorat Provsu |
| 10 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah | Kementerian Dalam Negeri | Inspektorat Provsu |
| 11 | Administrator Database Kependudukan | Kementerian Dalam Negeri | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu |
| 12 | Polisi Pamong Praja | Kementerian Dalam Negeri | Satuan Polisi dan Pamong Praja Provsu |
| 13 | Penata Ruang | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu |
| 14 | Pranata Komputer | Badan Pusat Statistik | |
| 15 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu |
| 16 | Analisis Hukum | Kementerian Hukum dan HAM | Biro Hukum Setdaprovsu |
| 17 | Penyuluh Kehutanan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 18 | Pengawas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 19 | Polisi Kehutanan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 20 | Pengendali Ekosistem Hutan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 21 | Pengendali Dampak Lingkungan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 22 | Penyuluh Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu |
| 23 | Administrator Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 24 | Apoteker | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 25 | Asisten Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 26 | Bidan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 27 | Dokter | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 28 | Dokter Gigi | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 29 | Epidemiologi Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 30 | Entomologi Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 31 | Fisioterapis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 32 | Nutrisionis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 33 | Ortotetis Protetis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 34 | Pembimbing Kesehatan Kerja | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 35 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 36 | Perawat | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 37 | Terapis Gigi Mulut | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 38 | Perekam Medis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 39 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 40 | Psikolog Klinis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 41 | Radiografer | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 42 | Refraksionis Optisien | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 43 | Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 44 | Teknisi Elektromedis | Kementerian Kesehatan | Dinas Kesehatan Provsu |
| 45 | Adikara Siaran/Pranata Siaran | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu |
| 46 | Pengawas Koperasi | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu |
| 47 | Pamong Budaya | Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu |
| 48 | Guru | Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Dinas Pendidikan Provsu |
| 49 | Pengawas Sekolah | Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi | Dinas Pendidikan Provsu |
| 50 | Pengawas Perdagangan | Kementerian Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu |
| 51 | Anais Perdagangan | Kementerian Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu |
| 52 | Penguji Mutu Barang | Kementerian Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu |
| 53 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Kementerian Perindustrian | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu |
| 54 | Analisis Ketahanan Pangan | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 55 | Analisis Pasar Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 56 | Medik Veteriner | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 57 | Pengawas Benih Tanaman | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 58 | Pengawas Bibit Ternak | Kementerian Pertanian | Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu |
| 59 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 60 | Pengawas Mutu Pakan | Kementerian Pertanian | Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu |
| 61 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 62 | Penyuluh Pertanian | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 63 | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 64 | Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian | Kementerian Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu |
| 65 | Pengelola Sumber Daya Air/Teknik Pengairan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 66 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan /Teknik Penyehatan Lingkungan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu |
| 67 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu |
| 68 | Penata Kelola Jalan dan jembatan/teknik Jalan dan Jembatan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu |
| 69 | Pembina Jasa Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu |
| 70 | Pekerja Sosial | Kementerian Sosial | Dinas Sosial Provsu |
| 71 | Penyuluh Sosial | Kementerian Sosial | Dinas Sosial Provsu |
| 72 | Pengawas Ketenagakerjaan | Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan Provsu |
| 73 | Mediator Hubungan Insdustrial | Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan Provsu |
| 74 | Pengantar Kerja | Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan Provsu |
| 75 | Instruktur | Kementerian Ketenagakerjaan | Dinas Ketenagakerjaan Provsu |
| 76 | Widyaiswara | Lembaga Administrasi Negara | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu |
| 77 | Analisis Kebijakan | Lembaga Administrasi Negara | Biro Organisasi Setdaprovsu |
| 78 | Analisis Pengembangan Kompetensi | Lembaga Administrasi Negara | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu |
| 79 | Peneliti | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu |
| 80 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprovsu |
| 81 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | Kementerian Keuangan | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu |
| 82 | Penilai Pemerintah | Kementerian Keuangan | Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu |
| 83 | Analisis Akuakultur /Pengawas Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu |
| 84 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu |
| 85 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu |